



Anggota DPRD Kota Yogyakarta
Susanto Dwi Antoro

Layanan Berbasis Digital dan Kota Ramah Investasi

Pemerintah Kota Yogyakarta sejak dua tahun terakhir mengembangkan pelayanan publik dengan basis teknologi digital. Aplikasi layanan itu bertajuk *Jogja Smart Service* (JSS). Banyak kemajuan dicapai dengan penerapan aplikasi JSS tersebut.



Masyarakat tidak harus datang. Perizinan bisa diproses dan diajukan dari rumah. Mal pelayanan publik sepi bukan berarti tak diminati. Layanan harus memberikan kemudahan dan terukur."

SUSANTO DWI ANTORO
Anggota DPRD Kota Yogyakarta



INOVATIF: Pemkot Yogyakarta mengembangkan layanan publik berbasis teknologi digital. Layanan Mal Pelayanan Publik juga menyediakan ruang konsultasi bagi mereka yang mengurus perizinan maupun investasi.

MASYARAKAT yang mengurus perizinan di Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Yogyakarta yang ada di kompleks Balai Kota Timoho, tak lagi harus antri. Tidak terlihat ada antrian panjang. "Masyarakat tidak harus datang. Perizinan bisa diproses dan diajukan dari rumah. Mal pelayanan publik sepi bukan berarti tak diminati. Layanan harus memberikan kemudahan dan terukur," ucap Anggota DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro.

Toro, sapaan akrabnya, ingin mencermati dampak JSS itu terhadap investasi. Baginya dengan pemanfaatan teknologi digital itu harus bisa mewujudkan tiga hal mendasar.

"Apakah bisa mempresentasikan Kota Jogja layak huni, layak investasi, dan layak dikunjungi," katanya.

Dengan demikian, layanan berbasis digital itu harus benar-benar dapat mendukung skema investasi. Sebab, mengakses lewat JSS masyarakat bisa mengetahui apa saja layanan yang dibutuhkan.

Ada 200 jenis layanan yang tersedia. "JSS itu ibaratnya satu pintu seribu jendela. Lebih lengkap dari Kota Semarang yang punya Seribu Pintu (Lawang Sewu, *Red*)," kelakarnya.

Toro kemudian memberikan ilustrasi layanan publik harus bisa hidup dan menghidupi. Efeknya bisa mendorong pendapatan asli daerah (PAD). Sebagaimana dipahami, lanjut Toro, PAD Kota Jogja bertumpu pada dua hal. Pertama, jasa pariwisata dan kedua, pendidikan. Kegiatan lainnya diharapkan senantiasa mendukung kedua sektor tersebut.

Wakil rakyat dua periode itu lagi-lagi mengingatkan pentingnya wajah kota yang ramah investasi. Keberadaan Mal Pelayanan Publik dan JSS sebagai sarana pendukungnya harus bisa memberikan kepastian. Menyangkut waktu dan akurasi.

Meski ada JSS, tak berarti pemohon izin maupun mereka yang hendak mengadakan investasi di kota pelajar ini tidak bisa bertatap muka langsung dengan petugas. Ada gerai investasi dan ruang konsultasi bagi masyarakat. Semua dilayani di Dinas PMPTSP Kota Yogyakarta.

Soal ramah investasi, lanjut politisi yang mewakili Dapil Umbulharjo dan Kotagede ini tak bisa lepas dengan pariwisata. Begitu pula JSS sebagai aplikasi layanan berbasis teknologi digital. Toro menilai, wisatawan atau siapapun pengunjung yang ingin ke Kota Jogja harus dipaksa menggunakan JSS. Ada sebanyak 25 kampung wisata, 31 kampung rintisan budaya dan 7 kampung budaya yang siap dikunjungi. Semua terangkum dalam layanan digital.

Meski begitu, Toro mengingatkan agar keamanan data mereka yang mengakses layanan JSS benar-benar bisa terjaga. Kasus yang terjadi di Kementerian Kominfo RI yang kebocoran data harus menjadi pelajaran. "Jangan sampai itu terjadi di Jogja," pintanya. (kus/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005